

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Alfred W. Blumrosen, *Slave Nation: How Slavery United the Colonies & Sparked the American Revolution*, (Naperville: Sourcebooks, 2005)
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, (Jakarta: Djambatan, 2003)
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)
- Dwi Putra Nugraha, *Pancasila Dalam Pusaran Politik Identitas*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2023)
- Edimarwan, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan Legal Protection for The Victim of Land Case*”, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003)
- Gunanegara, *Hukum Administrasi Negara, Jual Beli Dan Pembebasan Tanah*, (Jakarta: Tatanusa, 2016)
- Hasan Wargakusumah, *Hukum Agraria I Buku Panduan Mahasiswa*, (Gramedia: Jakarta Pustaka Utama, 1992)
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Press, 2015)
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011).
- Messakh dan Arnolus Thobias, *Konsep Keadilan dalam Pancasila* (Salatiga: Satya Wacana Christian University Press, 2007)
- Muhammad Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Teguh Prasetyo, *Teori Keadilan Bermartabat*, (Bandung: Nusamedia, 2015)
- Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, (Bandung: Nusamedia, 2015)
- Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007)
- Sudjarwo Marsoem, *Pedoman Lengkap Ganti Untung Pengadaan Tanah* (Jakarta: Renebook, 2015)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Syarifuddin Kalo, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2004)

## Jurnal:

- Achmad Wirabrata dan T. Ade Surya, “Masalah Kebijakan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur”, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* Vol. 2, No. 2 Desember 2011. DOI: <https://doi.org/10.22212/jekp.v2i2.126>
- Bivitri Susanti, “Mayoal Jenis dan Hierarki Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Jentera*, Vol. 1, No. 2 (2017)
- Desi Apriani dan Arifin Bur, “Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah di Indonesia”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 5, No. 1 Maret 2021. DOI: <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.11>
- Ferry Irawan Febriansyah, “Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa”, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 13, No. 25 Februari 2017. DOI: <https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545>
- Hardianto Djanggih dan Salle, “Aspek Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum”, *Jurnal Pandecta* Vol. 12, No. 2 Desember 2017. DOI: <https://doi.org/10.15294/pandecta.v12i2.11677>
- I Gde Suranaya Pandit, “Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 1 Desember 2016. DOI: <https://doi.org/10.22225/pi.1.1.2016.14-20>
- Mudjono, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan”, *Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 3 Juli 2007.
- Rio Admiral Parikesit, “Penerapan Asas Legalitas (*Legalitiet Beginsel/Wetmatigheid Van Bestuur*) Dalam Kebijakan Sentralisasi Pengharmonisan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 4 Desember 2021. DOI: <https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.809>
- Rosiana dan Junaidi Tarigan, “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 4, No. 2 April 2022. DOI: <https://doi.org/10.52005/rechten.v4i2.101>
- Sulasi Rongiyati, “Eksistensi Lembaga Penilai Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Umum”, *Jurnal Negara Hukum* Vol. 3, No. 1 Juni 2012. DOI: <https://doi.org/10.31292/jb.v5i2.371>
- Taysah Meyliza dan Sunny Ummul Firdauz, “Implementasi Kedaulatan Rakyat Dalam Pelaksanaan Pemilu di Indonesia”, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No.1 (2022). DOI: <https://doi.org/10.13057/souvereignty.v1i1.218>
- Wenny Yolanda Ratna Sari, *et.al*, “Evaluasi Pengadaan Tanah Skala Kecil dengan dan tanpa Penetapan Lokasi di Kabupaten Sleman”, *Jurnal Kebijakan Pertanahan*, Vol. 1, No. 1. November 2021. DOI: <https://doi.org/10.31292/jm.v1i1.4>
- Y. Eko Haryanto, “Penyelesaian Sengketa Penetapan Ganti Rugi Tanah Untuk Pembangunan Jalur Kereta Cepat Jakarta Bandung Di Kabupaten Karawang”, *Jurnal Pakuan Law Review*, Vol. 6, No. 2 Desember 2020. DOI: <https://doi.org/10.33751/palar.v6i2.2387>

Zalfa Dhea Fairuz Shofi, *et.al*, “Aspek Hukum Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”, e-Journal Komunikasi Yustisia, Vol. 5, No. 1 Maret 2022. DOI: <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.46072>

#### **Hasil Penelitian:**

Mohammad Paurindra Ekasetya, “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Analisis Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Brebes)”. Skripsi, Semarang: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2015

Supriyadi, “Rekonstruksi Kebijakan Pengadaan Tanah dan Kompensasinya Guna Kepentingan Proyek Strategis Nasional”. Disertasi, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2021

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Kementrian Agraria Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

PerkaBPN Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

## **Putusan:**

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 133/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel  
Putusan Mahkamah Agung Nomor 2544/K/Pdt/2017

## **Website/Internet:**

- Admin Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, “Hak Atas Tanah Menurut Hukum Agraria”. <https://fahum.umsu.ac.id/hak-hak-atas-tanah-menurut-hukum-agraria/>, diakses pada 18 September 2023.
- Arasy Pradana, “Jenis-Jenis Hak Atas Tanah dan yang Dapat Menjadi Pemegangnya”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-hak-atas-tanah-dan-yang-dapat-menjadi-pemegangnya-lt5eeb3b383296d/>, diakses pada 22 September 2023.
- Black Law Dictionary, “Eminent Domain Definition & Legal Meaning”, <https://thelawdictionary.org/eminant-domain/>, diakses pada 14 November 2023
- Erizka Permata Sari, “Jika Pemilik Tolak Ganti Kerugian Dan Tak Ajukan Keberatan ke Pengadilan Negeri”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-pemilik-tolak-ganti-kerugian-pengadaan-tanah-dan-tak-ajukan-keberatan-ke-pn-lt6126446604f4a/>, diakses pada 11 September 2023
- Lembaga Penelitian Universitas Medan Area, “Purposive Sampling- Definisi, Keuntungan, dan Cara Melakukannya”, <https://lp2m.uma.ac.id/2022/05/31/purposive-sampling-definisi-keuntungan-dan-cara-melakukannya/>, diakses pada 30 September 2023.
- Mochamad Harris, “Pengertian Tanah: Konsep dan Fungsinya”. <https://www.gramedia.com/literasi/tanah/>, diakses pada 13 September 2023.
- Rina Hayati, “Pengertian Valid, Jenis dan Contohnya”. <https://penelitianilmiah.com/pengertian-valid-jenis-dan-contohnya/>, diakses pada 26 September 2023.
- Rizka Noor Hashela, “Realitas Hukum Dalam Asas *Equality Before The Law*”. [https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel\\_hukum/detail/realitas-hukum-dalam-asas-equality-before-the-law](https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/realitas-hukum-dalam-asas-equality-before-the-law), diakses pada tanggal 24 September 2023.
- Universitas 17 Agustus 1945 Repository, “Penyelesaian Sengketa (ADR) Dibidang Pertanahan”. <http://repository.untag-sby.ac.id/7965/51/BAB%20II.pdf>, diakses pada 9 September 2023.
- Utami Argawati, “Konstitusi Indonesia Melindungi HAM Setiap Orang Termasuk WNA”. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id>, diakses pada 8 September 2023.
- Wagino, “Tinjauan Terhadap Perbuatan Melawan Hukum”. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14384/Tinjauan-terhadap-Gugatan-Perbuatan-Melawan-Hukum.html>, diakses pada 25 September 2023